








**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Nomor SOP	OT.01.02-002-055.De.3
Tanggal Pembuatan	Senin, 06 November 2017
Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
Disahkan oleh	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM  Jhoni Ginting, S.H., M.H. NIP. 196106121989031003
Judul SOP Mikro	Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Hukum dan HAM

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Hukum dan HAM 2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik 5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
Keterkaitan : 1. SOP Mikro Penyiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L di bidang Hukum dan HAM 2. SOP Mikro Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kebijakan K/L di bidang Hukum dan HAM	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Hukum dan HAM	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Hukum dan HAM

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Asdep	Kabid	Pelaksana (JF/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabid dan Pelaksana untuk melakukan persiapan teknis koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L				Program kerja + arahan Deputi	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Hukum dan HAM dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan				Disposisi/arahan Asdep	1 hari	Koordinasi + komunikasi teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	
3	Menyiapkan bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L terkait isu-isu di bidang Hukum dan HAM dan menyampaikannya kepada Kabid				Koordinasi + komunikasi teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1 hari	Bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L	
4	Meneliti dan mempelajari bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L terkait isu-isu di bidang Hukum dan HAM dan menyampaikannya ke Asdep				Bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L	30 Menit	Bahan/materi + hasil koordinasi	
5	Memeriksa bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Hukum dan HAM, jika setuju disampaikan kepada Deputi, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid + Pelaksana untuk diperbaiki				Bahan/materi + hasil koordinasi	15 Menit	Bahan/Materi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L bidang Hukum dan HAM	

